

Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan: Peran Kinerja Keuangan Daerah dan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Selatan

Muhammad Randi^{1*}, Amran Husen², Aziz Hasyim³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

E-mail: lensalipu@gmail.com

Article History:

Received: 21 Juli 2026

Revised: 22 Agustus 2026

Accepted: 08 September 2026

Keywords: Dana Desa;
Kemiskinan; Kinerja
Keuangan Daerah; Regresi
Linear; Wilayah Kepulauan

Abstract: Penelitian ini menganalisis pengaruh rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio belanja modal, dan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder tahunan periode 2015-2025 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Data tahunan diinterpolasi secara linear menjadi data triwulanan, ditransformasikan dengan logaritma natural, lalu dibentuk menjadi perubahan tahunan simetris sehingga model regresi menggunakan 40 observasi. Analisis dilakukan melalui regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien 0,038 dan probabilitas di bawah 0,001. Rasio efisiensi dan rasio belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan Dana Desa berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan dengan F sebesar 8,997 dan probabilitas di bawah 0,001. Model menjelaskan 50,7 persen variasi kemiskinan. Residual memenuhi normalitas serta tidak menunjukkan multikolinearitas serius dan heteroskedastisitas, tetapi terdapat indikasi autokorelasi positif dengan Durbin-Watson 0,655. Temuan menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum otomatis mengurangi kemiskinan. Pemerintah perlu mengarahkan pendapatan, efisiensi, investasi publik, dan Dana Desa pada hasil yang inklusif, terukur, dan berbasis wilayah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan. Kemiskinan juga terlihat pada keterbatasan akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, hunian layak, pekerjaan produktif, dan perlindungan ketika rumah tangga

menghadapi guncangan. Pemerintah daerah memegang peran penting karena sebagian besar layanan dasar dan infrastruktur yang menentukan kualitas hidup masyarakat dikelola melalui anggaran daerah dan desa. Karena itu, evaluasi kemiskinan perlu menghubungkan hasil sosial dengan kapasitas fiskal, komposisi belanja, dan kualitas tata kelola.

Desentralisasi fiskal memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali pendapatan dan menentukan prioritas pengeluaran sesuai kebutuhan lokal. Kewenangan ini menjanjikan kebijakan yang lebih responsif, tetapi tidak menjamin hasil yang lebih baik. Besarnya anggaran dapat berjalan bersama kemiskinan yang tetap tinggi ketika program tidak tepat sasaran, pelayanan tidak menjangkau wilayah terpencil, atau investasi publik tidak terhubung dengan kegiatan produktif. Indrawati et al. (2024) menekankan bahwa kualitas belanja dan kapasitas pelaksanaan menjadi bagian penting dari kebijakan fiskal setelah pandemi. Dwiputrianti et al. (2025) juga menunjukkan bahwa dampak pengeluaran pemerintah bergantung pada komposisi dan kemampuan institusi mengubah anggaran menjadi pembangunan manusia.

Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diwakili oleh rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio belanja modal. Rasio kemandirian menggambarkan kekuatan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pendapatan transfer. Rasio efisiensi menunjukkan hubungan realisasi belanja dan pendapatan sesuai formula operasional penelitian. Rasio belanja modal menunjukkan proporsi investasi publik dalam total belanja. Ketiga rasio merepresentasikan sumber pendapatan, proses pengelolaan, dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah.

Rasio kemandirian yang meningkat dapat memperluas ruang kebijakan lokal. Pemerintah lebih leluasa membiayai transportasi antarpulau, layanan kesehatan bergerak, beasiswa, pemberdayaan usaha, dan infrastruktur dasar. Namun, peningkatan PAD belum tentu menurunkan kemiskinan apabila tambahan penerimaan berasal dari pungutan yang membebani usaha kecil atau tidak dialokasikan kepada kelompok rentan. Hasanah et al. (2025) menunjukkan pentingnya PAD dalam memperkuat kemandirian fiskal, sedangkan Isman et al. (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas menentukan apakah kapasitas pendapatan menghasilkan kesejahteraan.

Efisiensi keuangan daerah juga memiliki hubungan yang kompleks dengan kemiskinan. Pengurangan pemborosan dapat menyediakan ruang bagi pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Sebaliknya, penghematan yang mengurangi mutu layanan justru memperbesar biaya yang harus ditanggung masyarakat miskin. Andiana dan Suhendri (2026) menunjukkan bahwa ruang fiskal dapat gagal menurunkan kemiskinan ketika tata kelola dan kapasitas daerah lemah. Efisiensi perlu dibaca sebagai kemampuan menghasilkan manfaat yang lebih besar, bukan sekadar menekan belanja.

Belanja modal dapat menurunkan kemiskinan melalui jalan, dermaga, air bersih, sanitasi, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jaringan digital. Infrastruktur yang tepat dapat mengurangi biaya transportasi, memperluas pasar, dan meningkatkan produktivitas. Dampaknya sering membutuhkan waktu dan bergantung pada lokasi, mutu konstruksi, pemeliharaan, serta keterhubungan dengan kebutuhan rumah tangga miskin. Zein et al. (2024) menempatkan kinerja keuangan dan belanja modal sebagai faktor penting dalam pembangunan regional, sedangkan Priambodo dan Djirimu (2024) menunjukkan bahwa pengaruh intervensi pemerintah dapat berbeda menurut karakter kemiskinan daerah.

Dana Desa menjadi instrumen fiskal yang paling dekat dengan masyarakat perdesaan. Dana ini dapat membiayai infrastruktur dasar, ketahanan pangan, perlindungan sosial, usaha desa, peningkatan keterampilan, dan kegiatan padat karya. Rammohan dan Tohari (2023) menemukan bahwa program Dana Desa berkaitan dengan perbaikan pengeluaran per kapita dan penurunan

kemiskinan perdesaan. Namun, dampaknya bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas perencanaan, kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, dan integrasi dengan program kabupaten (Ardiputra et al., 2025; Ginting et al., 2024).

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki karakter wilayah kepulauan dengan sebaran desa yang luas. Biaya transportasi, logistik, pengawasan, dan penyediaan layanan lebih tinggi daripada wilayah yang terkonsentrasi. Kondisi ini membuat kemampuan keuangan daerah dan Dana Desa sangat strategis, tetapi juga meningkatkan risiko ketimpangan akses. Harly et al. (2026) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal desa pada wilayah kepulauan perlu memperhatikan hambatan geografis dan kapasitas pemerintahan lokal.

Data 2021-2025 memperlihatkan pola yang tidak searah. Rasio kemandirian dan Dana Desa cenderung meningkat, rasio efisiensi menurun, rasio belanja modal berfluktuasi, sedangkan jumlah penduduk miskin naik dan turun. Kenaikan Dana Desa dan kemandirian pada 2023-2024 berlangsung bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada 2025, Dana Desa tetap meningkat sementara kemiskinan menurun. Pola tersebut tidak dapat dijelaskan melalui perbandingan sederhana dan memerlukan pengujian multivariat.

Penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan panel antardaerah atau menilai satu instrumen fiskal secara terpisah. Kajian yang menguji rasio kemandirian, efisiensi, belanja modal, dan Dana Desa secara bersamaan pada satu kabupaten kepulauan masih terbatas. Kebaruan penelitian terletak pada reformulasi Dana Desa sebagai variabel independen langsung dan pengujian konfigurasi empat determinan fiskal terhadap kemiskinan. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh parsial dan simultan seluruh variabel serta merumuskan implikasi kebijakan bagi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan.

LANDASAN TEORI

Keuangan Publik, Desentralisasi Fiskal, dan Kemiskinan

Teori keuangan publik menjelaskan peran pemerintah dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang publik dan infrastruktur. Fungsi distribusi mengarahkan anggaran untuk memperluas kesempatan serta melindungi kelompok berpendapatan rendah. Fungsi stabilisasi menjaga layanan dan daya beli masyarakat ketika terjadi guncangan. Ketiga fungsi tersebut memberi dasar untuk menilai kinerja keuangan daerah dan Dana Desa melalui hasil sosial berupa kemiskinan.

Desentralisasi fiskal berangkat dari asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki informasi lebih dekat mengenai kebutuhan masyarakat. Keunggulan informasi tersebut hanya memberi manfaat apabila kapasitas perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, dan pengawasan memadai. Hilmiyah dan Anggita (2025) menunjukkan bahwa hubungan desentralisasi fiskal dan kemiskinan bersifat kontekstual. Warokka et al. (2025) menambahkan bahwa tata kelola etis, kapasitas implementasi, keterbukaan, dan partisipasi menjadi syarat keberlanjutan pengelolaan dana desa.

Kinerja Keuangan Daerah

Rasio kemandirian mengukur kemampuan daerah membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan melalui PAD dibandingkan transfer. Secara normatif, peningkatan rasio diharapkan memperluas pembiayaan program pro-kemiskinan. Hubungan empiris dapat berbeda ketika tambahan PAD tidak dialokasikan secara inklusif. Zahirah dan Dewi (2025) menemukan bahwa rasio kemandirian dan belanja daerah dapat bergerak positif dengan kemiskinan, sehingga kapasitas fiskal perlu dibaca bersama distribusi manfaat.

Rasio efisiensi menghubungkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Nilai yang lebih rendah umumnya menunjukkan penggunaan sumber daya yang lebih proporsional ketika belanja ditempatkan sebagai pembilang. Efisiensi yang relevan bagi kemiskinan harus menjaga mutu layanan dan jangkauan wilayah. Pada daerah kepulauan, biaya per penerima dapat lebih tinggi karena transportasi dan skala pelayanan. Karena itu, evaluasi efisiensi tidak boleh hanya menggunakan penghematan nominal.

Rasio belanja modal menunjukkan orientasi investasi publik. Aset publik dapat menurunkan biaya transaksi dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pasar, air bersih, dan pekerjaan. Namun, manfaat bergantung pada kualitas proyek, lokasi, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Nadella dan Hutabarat (2025) menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan tidak selalu signifikan, sedangkan Dira dan Ichsan (2025) menekankan pentingnya kombinasi belanja modal dengan instrumen sosial dan Dana Desa.

Dana Desa dan Kesejahteraan Perdesaan

Dana Desa memperluas desentralisasi sampai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Pengaruh terhadap kemiskinan dapat berlangsung melalui bantuan sosial, padat karya, infrastruktur lokal, ketahanan pangan, usaha desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ferdinandus dan Park (2023), Paska et al. (2025), serta Zaen dan Perdana (2025) menunjukkan bahwa Dana Desa dapat mendukung penurunan kemiskinan, tetapi besarnya dampak berbeda antarwilayah.

Kualitas kelembagaan desa menentukan keberhasilan program. Permatasari et al. (2024) menyoroti pentingnya akuntabilitas sistem pelaporan. Hakim et al. (2025) menunjukkan hubungan antara demokrasi desa dan kesejahteraan. Sebayang et al. (2025) menegaskan bahwa institusi lokal memengaruhi kemampuan Dana Desa mengurangi kemiskinan. Kerangka penelitian ini karena itu tidak mengasumsikan bahwa kenaikan alokasi otomatis menghasilkan penurunan kemiskinan.

Kerangka Hubungan dan Hipotesis

Model penelitian menempatkan rasio kemandirian sebagai X1, rasio efisiensi sebagai X2, rasio belanja modal sebagai X3, Dana Desa sebagai X4, dan jumlah penduduk miskin sebagai Y. Pengaruh setiap variabel diuji secara parsial setelah variabel lain dikendalikan. Pengujian simultan menilai apakah konfigurasi kapasitas pendapatan, kualitas pengelolaan, orientasi investasi, dan transfer desa mempunyai daya jelas terhadap perubahan kemiskinan.

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa setiap variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan dan seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Arah empiris dibiarkan terbuka karena teori dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan kemungkinan hubungan negatif, positif, atau tidak signifikan sesuai kualitas tata kelola, jeda waktu, dan karakter wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain studi kasus pada Kabupaten Halmahera Selatan. Data penelitian berbentuk deret waktu tingkat kabupaten. Istilah pengaruh dalam penelitian merujuk pada pengaruh statistik dalam model regresi, bukan pembuktian kausal mutlak, karena data berasal dari catatan observasional sekunder tanpa eksperimen.

Data mentah mencakup tahun 2015-2025. Sumber utama adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, laporan realisasi APBD atau dokumen BPKAD, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan. Data meliputi PAD, pendapatan transfer,

realisasi pendapatan, realisasi belanja, belanja modal, realisasi Dana Desa, dan jumlah penduduk miskin.

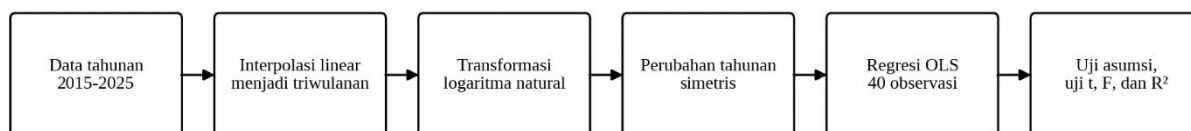
Sebelas observasi tahunan dinilai terbatas untuk model dengan empat prediktor. Lembar pengolahan penelitian mengubah data tahunan menjadi 44 titik triwulanan melalui interpolasi linear. Data selanjutnya ditransformasikan dengan logaritma natural dan perubahan tahunan simetris. Empat observasi awal hilang karena penggunaan jeda empat triwulan, sehingga estimasi menggunakan 40 observasi periode 2016Q1-2025Q4. Interpolasi menambah titik komputasional, tetapi tidak menciptakan informasi ekonomi baru yang setara dengan pengamatan triwulanan faktual.

Model diestimasi menggunakan regresi linear berganda dengan metode ordinary least squares. Pengujian meliputi normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, uji t, uji F, R-squared, dan adjusted R-squared. Taraf signifikansi ditetapkan sebesar 5 persen. Interpretasi hasil mempertimbangkan formula variabel, proses transformasi, dan keterbatasan data interpolasi (Ghozali, 2021; Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2020).

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi operasional	Rumus/indikator	Satuan
Rasio kemandirian (X1)	Kemampuan PAD relatif terhadap pendapatan transfer.	$(PAD / \text{pendapatan transfer}) \times 100\%$	Persen
Rasio efisiensi (X2)	Perbandingan realisasi belanja dan realisasi pendapatan.	$(\text{realisasi belanja} / \text{realisasi pendapatan}) \times 100\%$	Persen
Rasio belanja modal (X3)	Proporsi belanja modal dalam total belanja daerah.	$(\text{belanja modal} / \text{total belanja}) \times 100\%$	Persen
Dana Desa (X4)	Total realisasi Dana Desa seluruh desa dalam kabupaten.	Realisasi per tahun	Rupiah
Kemiskinan (Y)	Jumlah penduduk miskin menurut pendekatan kebutuhan dasar BPS.	Jumlah penduduk miskin	Jiwa

Sumber: Definisi operasional penelitian, 2026.



Gambar 1. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Sumber: Disusun oleh peneliti, 2026.

Persamaan regresi dirumuskan sebagai $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$. Koefisien beta menunjukkan perubahan rata-rata variabel kemiskinan akibat perubahan prediktor dalam skala data olahan, dengan variabel lain tetap. Koefisien tidak ditafsirkan sebagai elastisitas murni karena data akhir berupa perubahan tahunan simetris dari logaritma hasil interpolasi. Pemeriksaan signifikansi tetap menjadi dasar pengujian hipotesis, tetapi hasil perlu dibaca bersama diagnosis residual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Variabel Penelitian

Data mentah memperlihatkan perubahan yang cukup besar selama 2015-2025. Rasio kemandirian meningkat dari 3,32 persen menjadi 14,34 persen. Rasio efisiensi turun dari 3.724,86 persen menjadi 767,69 persen. Rasio belanja modal berfluktuasi antara 18,61 persen dan

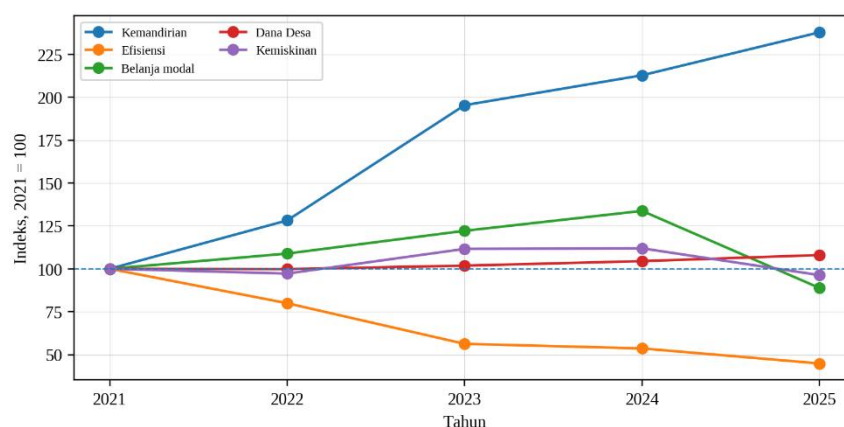
30,48 persen. Dana Desa meningkat dari Rp65,64 miliar menjadi Rp212,20 miliar. Jumlah penduduk miskin bergerak dari 10.090 jiwa pada 2015, mencapai 13.690 jiwa pada 2024, lalu turun menjadi 11.780 jiwa pada 2025.

Periode 2021-2025 memberi gambaran yang lebih dekat dengan kondisi terkini. Kemandirian meningkat secara konsisten, sedangkan rasio efisiensi menurun. Rasio belanja modal naik sampai 2024, kemudian turun tajam pada 2025. Dana Desa terus meningkat setelah penurunan tipis pada 2022. Kemiskinan turun pada 2022, naik pada 2023-2024, kemudian kembali turun pada 2025. Ketidaksamaan arah ini menunjukkan bahwa perubahan fiskal tidak diterjemahkan menjadi perubahan sosial secara mekanis.

Tabel 2. Perkembangan Variabel Fiskal dan Kemiskinan Tahun 2021-2025

Tahun	Kemandirian (%)	Efisiensi (%)	Belanja modal (%)	Dana Desa (Rp miliar)	Kemiskinan (jiwa)
2021	6,03	1.712,37	20,95	196,44	12.230
2022	7,73	1.368,89	22,81	196,10	11.890
2023	11,78	963,34	25,59	200,05	13.650
2024	12,83	917,85	28,02	205,23	13.690
2025	14,34	767,69	18,61	212,20	11.780

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS Kabupaten Halmahera Selatan, diolah, 2026.



Gambar 2. Perbandingan Arah Perkembangan Variabel Tahun 2021-2025

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Data Tahunan 2015-2025

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Satuan
Rasio kemandirian	2,22	14,34	6,63	Persen
Rasio efisiensi	767,69	4.571,26	2.467,43	Persen
Rasio belanja modal	18,61	30,48	25,54	Persen
Dana Desa	Rp65,64 miliar	Rp212,20 miliar	Rp179,78 miliar	Rupiah
Kemiskinan	9.060	13.690	11.532	Jiwa

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Kelayakan Model dan Diagnosis Residual

Uji normalitas menghasilkan probabilitas Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,097, sehingga residual dinilai berdistribusi normal. Seluruh nilai tolerance berada di atas 0,10 dan VIF berada di bawah 10. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas serius. Uji Glejser juga

menghasilkan probabilitas di atas 0,05 pada seluruh prediktor, sehingga heteroskedastisitas tidak terdeteksi.

Nilai Durbin-Watson sebesar 0,655 menunjukkan indikasi kuat autokorelasi positif. Temuan ini penting karena data dibentuk melalui interpolasi dan perubahan tahunan yang saling tumpang tindih. Autokorelasi dapat membuat standar galat dan tingkat signifikansi kurang tepat. Hasil regresi tetap disajikan sesuai keluaran penelitian, tetapi kesimpulan perlu dibaca secara hati-hati dan diuji kembali menggunakan Prais-Winsten, Cochrane-Orcutt, standar galat tahan autokorelasi, atau data aktual dengan frekuensi lebih tinggi.

Tabel 4. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Indikator utama	Nilai	Kesimpulan
Normalitas	Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov	0,097	Residual normal
Multikolinearitas	VIF tertinggi	3,673	Tidak serius
Heteroskedastisitas	Sig. Glejser terendah	0,134	Tidak terdeteksi
Autokorelasi	Durbin-Watson	0,655	Indikasi positif kuat

Sumber: Hasil pengolahan data, 2026.

Hasil Regresi Linear Berganda

Model menghasilkan R sebesar 0,712 dan R-squared sebesar 0,507. Artinya, rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio belanja modal, dan Dana Desa mampu menjelaskan 50,7 persen variasi kemiskinan dalam skala data olahan. Adjusted R-squared sebesar 0,451 menunjukkan daya jelas model setelah memperhitungkan jumlah prediktor dan observasi. Sisanya dipengaruhi faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, inflasi, ketimpangan, demografi, dan akses pasar.

Uji F menghasilkan nilai 8,997 dengan probabilitas di bawah 0,001. Keempat variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi kapasitas pendapatan, kualitas pengelolaan, investasi publik, dan pendanaan desa mempunyai informasi yang bermakna terhadap perubahan kemiskinan. Pengaruh kolektif lebih kuat daripada sebagian besar pengaruh parsial.

Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. error	Beta	t	Sig.	Keputusan
Konstanta	2.277.331,71	1.524.168,01	-	1,494	0,140	Tidak signifikan
Kemandirian (X1)	0,038	0,009	0,853	4,021	<0,001	Positif, signifikan
Efisiensi (X2)	0,105	0,075	0,316	1,390	0,170	Tidak signifikan
Belanja modal (X3)	0,011	0,023	0,059	0,462	0,650	Tidak signifikan
Dana Desa (X4)	-0,056	0,049	-0,170	-1,150	0,260	Tidak signifikan

Keterangan: R-squared = 0,507; adjusted R-squared = 0,451; F = 8,997; p < 0,001. Sumber: Hasil pengolahan data, 2026.

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Kemiskinan

Rasio kemandirian memiliki koefisien 0,038, beta terstandarisasi 0,853, dan probabilitas di bawah 0,001. Variabel ini menjadi satu-satunya prediktor yang signifikan secara parsial. Arah positif menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian selama periode penelitian berjalan bersama peningkatan kemiskinan setelah variabel lain dikendalikan. Temuan tidak berarti PAD menyebabkan kemiskinan secara langsung. Koefisien menggambarkan hubungan dalam struktur data dan periode yang digunakan.

Terdapat beberapa penjelasan substantif. Pertama, kenaikan PAD belum tentu diarahkan pada program yang menjangkau rumah tangga miskin. Kedua, sumber PAD dapat berasal dari

pungutan atau aktivitas ekonomi yang manfaatnya terkonsentrasi. Ketiga, peningkatan pendapatan lokal dapat berlangsung lebih cepat daripada kemampuan pemerintah mengubahnya menjadi layanan dan kesempatan kerja. Keempat, perubahan kemiskinan dapat mendorong respons fiskal sehingga hubungan dua arah tidak sepenuhnya dapat dipisahkan oleh regresi biasa.

Temuan ini sejalan dengan Zahirah dan Dewi (2025), yang menemukan hubungan positif antara rasio kemandirian dan kemiskinan pada konteks lain. Hasil tersebut menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan kapasitas, bukan hasil akhir. Pemerintah perlu menghubungkan pertumbuhan PAD dengan target kemiskinan yang jelas, seperti peningkatan pendapatan usaha mikro, akses kesehatan, pendidikan, air bersih, transportasi, dan pekerjaan pada desa prioritas.

Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Kemiskinan

Rasio efisiensi memiliki koefisien positif 0,105 dengan probabilitas 0,170. Arah positif menunjukkan kecenderungan bahwa rasio yang lebih tinggi, yang mencerminkan penggunaan belanja yang semakin besar relatif terhadap pendapatan, berkaitan dengan kemiskinan yang lebih tinggi. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan. Perubahan efisiensi belum terbukti menjadi determinan parsial kemiskinan setelah variabel lain diperhitungkan.

Nilai rasio efisiensi yang sangat tinggi menuntut verifikasi formula, komponen, dan satuan. Kesalahan skala dapat mengubah interpretasi. Selain itu, efisiensi fiskal tidak identik dengan efektivitas program. Penghematan administratif baru relevan bagi kemiskinan ketika sumber daya dialihkan pada layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Pada wilayah kepulauan, biaya pelayanan yang tinggi dapat tetap wajar ketika diperlukan untuk menjangkau pulau terpencil.

Kebijakan perlu mengarah pada efisiensi berorientasi hasil. Pemerintah dapat menilai biaya per penerima, biaya per keluaran, ketepatan pengadaan, penggunaan aset, dan waktu pelayanan. Digitalisasi administrasi, konsolidasi pengadaan, serta pengurangan kegiatan yang tidak terkait hasil dapat membebaskan ruang fiskal. Ruang tersebut perlu dikunci untuk program dengan sasaran kemiskinan yang terukur.

Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Kemiskinan

Rasio belanja modal memiliki koefisien positif 0,011 dan probabilitas 0,650. Proporsi belanja modal belum terbukti memengaruhi kemiskinan secara parsial. Arah positif menunjukkan bahwa peningkatan investasi publik pada beberapa periode belum diikuti penurunan jumlah penduduk miskin. Temuan dapat mencerminkan jeda waktu, pilihan proyek, lokasi pembangunan, atau rendahnya keterhubungan aset dengan mata pencaharian kelompok miskin.

Belanja modal tetap penting secara substantif. Infrastruktur dapat memperluas pasar dan layanan, tetapi manfaatnya tidak muncul hanya karena anggaran meningkat. Proyek perlu dipilih berdasarkan peta kemiskinan, konektivitas produksi, kebutuhan layanan dasar, dan kemampuan pemeliharaan. Nadella dan Hutabarat (2025) juga menemukan bahwa belanja modal tidak selalu signifikan terhadap kemiskinan. Priambodo dan Djirimu (2024) menegaskan bahwa dampak intervensi pemerintah berbeda menurut kondisi wilayah.

Bagi Halmahera Selatan, belanja modal perlu diarahkan pada konektivitas antarpulau, jalan produksi, dermaga, air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, sekolah, pasar, dan jaringan digital. Pengukuran hasil harus mencakup penurunan waktu tempuh, biaya logistik, peningkatan akses layanan, dan pendapatan penerima manfaat. Pendekatan ini membuat investasi publik lebih dekat dengan tujuan penurunan kemiskinan.

Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan

Dana Desa memiliki koefisien negatif -0,056 dengan probabilitas 0,260. Arah negatif sesuai harapan normatif, yaitu peningkatan Dana Desa cenderung berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Namun, hubungan belum cukup kuat secara statistik. Besaran transfer belum otomatis menunjukkan kualitas program, ketepatan penerima, atau keberlanjutan manfaat.

Hasil ini dapat dipengaruhi beberapa faktor. Dana Desa membiayai berbagai tujuan, sehingga hanya sebagian yang memiliki jalur langsung terhadap kemiskinan. Dampak infrastruktur dan pemberdayaan memerlukan waktu. Perbedaan kapasitas desa dapat menghasilkan kinerja yang tidak seragam. Data agregat kabupaten juga menutupi variasi antar desa. Sebayang et al. (2025) dan Warokka et al. (2025) menunjukkan pentingnya institusi, partisipasi, kapasitas pelaksanaan, dan keterbukaan dalam menghasilkan manfaat Dana Desa.

Pemerintah desa perlu menyeimbangkan perlindungan jangka pendek dan penguatan pendapatan jangka panjang. Bantuan sosial melindungi konsumsi, sedangkan ketahanan pangan, usaha desa, pelatihan, pengolahan hasil, dan akses pasar membangun kapasitas produktif. Pemerintah kabupaten perlu memperkuat pendampingan, integrasi data, serta sinkronisasi program desa dengan belanja daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan layanan.

Pengaruh Simultan dan Implikasi Kebijakan

Signifikansi simultan menunjukkan bahwa kemiskinan lebih tepat dibaca melalui sistem fiskal yang terpadu. Kemandirian menyediakan ruang kebijakan, efisiensi menjaga penggunaan sumber daya, belanja modal membentuk aset produktif, dan Dana Desa menjangkau kebutuhan lokal. Kelemahan satu dimensi dapat mengurangi manfaat dimensi lain. Karena itu, kebijakan tidak cukup hanya meningkatkan satu pos anggaran.

Karakter kepulauan memperkuat kebutuhan koordinasi. Infrastruktur kabupaten perlu terhubung dengan proyek desa dan sentra produksi. Program pemberdayaan membutuhkan pasar, transportasi, pembiayaan, dan layanan digital. Bantuan sosial membutuhkan data yang mutakhir dan akses pelaporan. Pemerintah daerah perlu membangun satu peta yang menggabungkan kemiskinan, kondisi infrastruktur, layanan dasar, potensi ekonomi, risiko, dan alokasi anggaran.

Kemampuan model menjelaskan 50,7 persen variasi kemiskinan menunjukkan bahwa faktor fiskal penting, tetapi bukan satu-satunya penentu. Pertumbuhan ekonomi, pekerjaan, inflasi, pendidikan, kesehatan, ketimpangan, demografi, dan akses pasar perlu dipertimbangkan. Kebijakan fiskal harus disinergikan dengan penciptaan kerja, pengembangan agromaritim, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas manusia.

Hasil penelitian juga memiliki keterbatasan metodologis. Data triwulanan berasal dari interpolasi, bukan observasi faktual. Indikasi autokorelasi mengurangi kepastian inferensi. Variabel kemiskinan menggunakan jumlah penduduk miskin, bukan persentase, kedalaman, atau keparahan kemiskinan. Karena itu, temuan lebih tepat digunakan sebagai bukti awal untuk evaluasi kebijakan dan bukan sebagai kesimpulan kausal final.

Tabel 6. Ringkasan Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Arah hasil	Signifikansi	Keputusan
H1: Kemandirian -> kemiskinan	Positif	Signifikan	Diterima
H2: Efisiensi -> kemiskinan	Positif	Tidak signifikan	Tidak diterima
H3: Belanja modal -> kemiskinan	Positif	Tidak signifikan	Tidak diterima
H4: Dana Desa -> kemiskinan	Negatif	Tidak signifikan	Tidak diterima
H5: X1-X4 -> kemiskinan	Simultan	Signifikan	Diterima

Sumber: Hasil pengolahan data, 2026.

Tabel 7. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Temuan Penelitian

Temuan utama	Masalah kebijakan	Tindakan prioritas
Kemandirian positif dan signifikan	PAD belum otomatis menjadi manfaat bagi kelompok miskin.	Kaitkan tambahan PAD dengan target kemiskinan, layanan dasar, dan penguatan usaha lokal.
Efisiensi belum signifikan	Pengukuran rasio dan hasil belanja belum terintegrasi.	Verifikasi formula, ukur biaya per hasil, dan alihkan penghematan ke program prioritas.
Belanja modal belum signifikan	Aset belum selalu terhubung dengan kantong kemiskinan.	Gunakan peta kemiskinan, analisis manfaat, dan rencana pemeliharaan sejak awal.
Dana Desa negatif, belum signifikan	Kualitas tata kelola dan variasi desa menahan dampak.	Perkuat partisipasi, data keluarga miskin, usaha produktif, dan sinkronisasi kabupaten-desa.
Model simultan signifikan	Instrumen fiskal masih dikelola secara sektoral.	Bangun perencanaan lintas tingkat, dashboard hasil, dan evaluasi berbasis pulau serta desa.

Sumber: Sintesis hasil penelitian, 2026.

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio belanja modal, dan Dana Desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan. Model menjelaskan 50,7 persen variasi kemiskinan. Secara parsial, rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan. Rasio efisiensi dan rasio belanja modal memiliki arah positif tetapi tidak signifikan, sedangkan Dana Desa memiliki arah negatif tetapi tidak signifikan.

Temuan utama menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal tidak otomatis menghasilkan penurunan kemiskinan. Kemandirian baru memberi manfaat ketika tambahan PAD dialokasikan secara inklusif. Efisiensi perlu diukur melalui hasil, bukan hanya penghematan. Belanja modal perlu diarahkan pada infrastruktur yang digunakan kelompok miskin. Dana Desa memerlukan tata kelola, partisipasi, dan integrasi program agar dampaknya lebih kuat.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu membangun kebijakan fiskal terpadu berbasis peta kemiskinan. Peningkatan PAD harus menghindari beban berlebihan bagi usaha kecil. Belanja modal perlu memprioritaskan konektivitas, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, pasar, dan kegiatan produktif. Pemerintah desa perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, serta transparansi penggunaan Dana Desa. Evaluasi tahunan harus menilai perubahan akses, pendapatan, kesempatan kerja, dan status kemiskinan, bukan hanya penyerapan anggaran.

Penafsiran hasil perlu mempertimbangkan indikasi autokorelasi dan penggunaan data hasil interpolasi. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data aktual triwulanan atau panel desa dan kecamatan, indikator persentase serta kedalaman kemiskinan, variabel nonfiskal, dan metode yang menangani autokorelasi serta kemungkinan hubungan dua arah. Langkah tersebut akan memperkuat validitas inferensi dan menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi.

DAFTAR REFERENSI

- Andiana, B. D. L., & Suhendri, A. (2026). Ketika ruang fiskal gagal mengurangi kemiskinan: Filter tata kelola dan kapasitas fiskal regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019-2023. *Jurnal Bina Praja*. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/3188>
- Ardiputra, S., Milyan, M., Akhmad, Z., Sulthan, M., et al. (2025). Optimizing budget policy in village fund allocation (ADD): A governance and public administration perspective on rural development. *Frontiers in Political Science*, 7, 1581806. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1581806>

-
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan. (2026). Data kemiskinan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015-2025. BPS Kabupaten Halmahera Selatan.
- Dira, N., & Ichsan, I. (2025). The effectiveness of policies on village fund, social assistance and capital expenditure on poverty alleviation in Aceh Province. *Journal of Malikussaleh Public Economics*. <https://ojs.unimal.ac.id/jompe/article/view/24980>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Data APBD dan Dana Desa Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015-2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwiputrianti, S., Situngkir, S. Y. L., Lele, G., et al. (2025). Strategic government spending and human development in Papua: District-level panel evidence, 2018-2022. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2582221>
- Ferdinandus, N., & Park, S. C. (2023). The effectiveness of the implementation of the Village Fund Program for reducing poverty in Indonesia rural areas. *Journal of Saemaology*.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., et al. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura Village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hakim, L., Kolopaking, L. M., Sjaf, S., et al. (2025). Assessing village democracy and welfare in rural Indonesia: An index-based correlation analysis. *Frontiers in Political Science*, 7, 1622507. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1622507>
- Harly, K. E., Ahmad, A. C., & Jacob, J. (2026). Village fiscal policies as an instrument for poverty alleviation: An empirical study of the island regions of North Maluku, Indonesia. *Advances in Management & Financial Reporting*.
- Hasanah, N., Masdar, R., & Furqan, A. C. (2025). Empirical evidence on the role of local own-source revenue in strengthening fiscal independence of Indonesian local governments. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*.
- Hilmiyah, F., & Anggita, A. N. (2025). The effect of fiscal decentralization and economic growth on poverty reduction: A case study of Grobogan Regency. *Jurnal Bina Pembangunan*.
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., et al. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Isman, M. H. S., Salomo, R. V., & Bakri, M. R. (2025). Impact of fiscal transfers and local revenue accountability on community welfare in Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*.
- Nadella, N., & Hutabarat, R. E. (2025). The impact of village funds, locally-generated revenue, capital expenditure, and open unemployment rate on poverty in East Java, 2020-2024. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*.
- Palisuri, P., Karim, A., & Sunarya, W. A. (2024). Effectiveness of Village Fund policy to improve economic development and rural infrastructure in East Luwu Regency, Indonesia. *Nanotechnology Perceptions*.

-
- Paska, E. D., Firdaus, R., Badaruddin, R., et al. (2025). Do village funds promote rural development and alleviate poverty in Indonesia? Implications for village funds policies. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 33(2).
- Permatasari, P., Budiarto, A., Dartanto, T., et al. (2024). Village fund management and reporting systems: Are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(4), 512.
- Priambodo, A. P., & Djirimu, M. A. (2024). Government intervention strategy in poverty reduction: Study on the district and city in Indonesia across 2016-2023. *Jurnal Bina Praja*.
- Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: Evidence from Indonesia's Village Fund program. *PLOS ONE*, 18(6), e0283041. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ruja, I. N., Sumarmi, & Idris. (2024). Programs, opportunities, and challenges in poverty reduction: A systematic review. *SAGE Open*. <https://doi.org/10.1177/21582440241256242>
- Sari, J. A., & Sunarya, A. (2025). The role of the Village Fund Program in alleviating poverty in rural areas. *Dirasat: Human and Social Sciences*.
- Sebayang, A. F., Arsyad, L., & Hardi, A. S. (2025). Poverty, institutions, and village funds: Case of rural areas in Brebes and Banyumas Regencies, Central Java Province, Indonesia. *Southeast Asian Journal of Economics*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Wardhani, D. T. K., Altin, D., & Suhdi. (2025). Diagnosing accountability challenges in Indonesia's village fund: A PESTEL-PRMT multi-case analysis in post-decentralization governance. *Public Organization Review*. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00922-0>
- Warokka, A., Warokka, M. N., & Aqmar, A. Z. (2025). Financing rural futures: Governance and contextual challenges of village fund management in underdeveloped regions. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(11), 603.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya disertai panduan EViews (Edisi 5)*. UPP STIM YKPN.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach (7th ed.)*. Cengage Learning.
- Zaen, N. S., & Perdana, A. R. A. (2025). Can village funds reduce the poverty rate in Kalimantan? *Economics, Finance, and Business Review*.
- Zahirah, Y. N., & Dewi, D. D. (2025). The effect of fiscal independence ratio, transfer funds and regional expenditure on poverty in Central Java Province 2020-2024. *Journal of Tourism Economics and Policy*.
- Zein, M. H. M., Muhtarom, M., Mulyadi, M., et al. (2024). The role of local government's financial performance and capital expenditure in increasing economic growth in Banten Province, Indonesia, 2018-2022. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(10), 456.